

BAB I

PENDAHULUAN

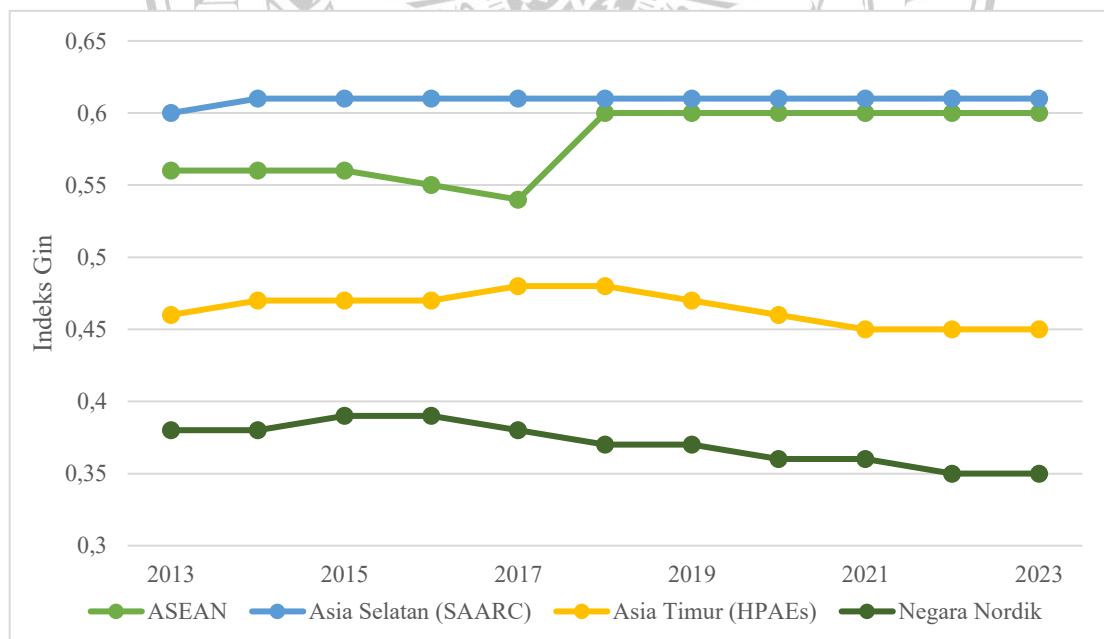
A. Latar Belakang Masalah

Ketimpangan pendapatan menjadi tantangan paling krusial yang menghambat pembangunan ekonomi global saat ini. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif di banyak negara. Namun, distribusi hasil pembangunan yang tidak merata mengakibatkan ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik yang semakin melebar. Ketimpangan ini memberikan pengaruh, tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga pada kawasan, khususnya di negara berkembang. Masalah ini berpotensi menghambat pertumbuhan berkelanjutan, memperluas kesenjangan kesejahteraan, dan mengancam stabilitas sosial (UNDP, 2023).

Tantangan ketimpangan global semakin terlihat setelah pandemi COVID-19. Pemulihan ekonomi yang bervariasi di berbagai negara telah memperburuk kesenjangan yang ada. Perbedaan akses terhadap vaksin, kapasitas fiskal untuk stimulus ekonomi, dan ketahanan sektor usaha telah menciptakan fenomena pemulihan yang tidak merata atau "*K-shaped recovery*" (United Nations, Asian Development Bank, 2022). Hal ini menambah kompleksitas tantangan ketimpangan yang dihadapi kawasan, terutama di negara-negara berkembang seperti ASEAN. Disparitas dalam kecepatan pemulihan ekonomi ini berpotensi menciptakan ketimpangan struktural jangka panjang jika tidak ditangani secara sistematis (Narayan et al., 2021).

Untuk memahami lebih dalam dampak ketimpangan pasca-pandemi ini, berikut disajikan ketimpangan pendapatan di ASEAN dengan tiga kelompok kawasan yang memiliki pengalaman berbeda: Asia Selatan (SAARC), Asia Timur (*High Performing Asian Economies/HPAEs*), dan negara-negara Nordik. Ketiga kawasan ini dipilih berdasarkan karakteristik ekonomi yang berbeda: SAARC memiliki tingkat pembangunan setara ASEAN, HPAs berhasil menerapkan pembangunan inklusif (H & Park, 2017), sementara negara-negara Nordik menjadi model global untuk distribusi pendapatan yang adil dan sistem kesejahteraan sosial. Perbandingan dengan kawasan-kawasan ini memungkinkan penelitian mengidentifikasi pola ketimpangan yang lebih luas dan mengevaluasi potensi serta keterbatasan kebijakan pembangunan kawasan secara objektif.

Grafik 1. 1 Perbandingan Rata-Rata Indeks Gini Kawasan (2013-2023)



Sumber: World Inequality Database (diolah), 2025

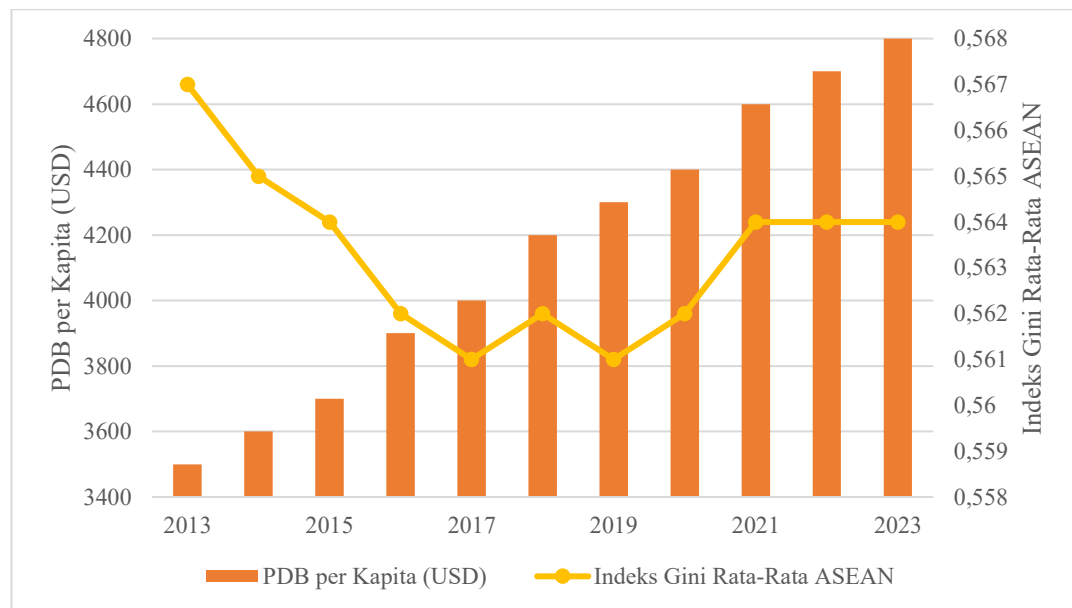
Pada Grafik 1.1 terlihat bahwa dalam perbandingan rata-rata Indeks Gini antar kawasan selama periode 2013–2023, ASEAN secara konsisten mencatat tingkat ketimpangan yang relatif tinggi, yakni berkisar antara 0,54 hingga 0,60. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di kawasan ASEAN masih jauh dari merata. Sebagai perbandingan, Asia Timur yang tergolong sebagai *High Performing Asian Economies* (HPAEs) mampu menjaga tingkat ketimpangan pada level yang lebih rendah, dengan indeks gini di bawah 0,48.

Sementara itu, negara-negara Nordik seperti Swedia, Norwegia, dan Denmark menunjukkan performa yang lebih baik lagi, dengan tingkat Gini yang konsisten berada di bawah 0,40 dan bahkan menunjukkan tren penurunan selama satu dekade terakhir. Perbedaan yang cukup mencolok ini menegaskan bahwa meskipun ASEAN mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tantangan ketimpangan pendapatan masih menjadi isu struktural yang belum terselesaikan secara efektif (World Inequality Database, 2025).

Hal ini menjadi ironi tersendiri, mengingat ASEAN merupakan salah satu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, yang didorong oleh peningkatan perdagangan internasional dan integrasi ekonomi kawasan. Studi oleh (Anwar et al., 2024) mengindikasikan bahwasanya aktivitas perdagangan bebas memberikan dampak yang besar bagi perkembangan perekonomian di kawasan ASEAN, menjadikan kawasan ini semakin strategis dalam peta ekonomi global. Meskipun indikator lain menunjukkan kemajuan, kesenjangan sosial-ekonomi tetap

menjadi tantangan besar yang mencerminkan hambatan struktural dalam pembangunan kawasan (H & Park, 2017).

Grafik 1. 2 Rata-Rata PDB per Kapita Indeks Gini ASEAN (2013-2023)



Sumber: *World Inequality Database dan World Bank (diolah), 2025*

Berdasarkan Grafik 1.2, rerata pendapatan domestik bruto (PDB) per kapita ASEAN menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dari tahun 2013 hingga 2023. Namun, peningkatan ini tidak diimbangi dengan perbaikan signifikan dalam ketimpangan pendapatan. Indeks Gini rata-rata tetap stagnan dan bahkan meningkat setelah 2019. Grafik tersebut memperlihatkan bahwa keuntungan dari peningkatan ekonomi masih terkonsentrasi secara tidak proporsional, sehingga menghasilkan fenomena pembangunan yang tidak merata.

Kondisi ini memperkuat temuan berbagai studi bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kawasan Asia Tenggara belum sepenuhnya inklusif.

Ketimpangan yang berkelanjutan ini dapat memicu ketegangan sosial dan menghambat proses integrasi ekonomi kawasan. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan integrasi kawasan seperti AEC (*ASEAN Economic Community*) agar dapat mengoptimalkan pertumbuhan sekaligus mengurangi kesenjangan antarnegara dan intranegara di ASEAN (Asean Development Bank, 2022).

Upaya ASEAN dalam membangun kawasan yang lebih inklusif telah diwujudkan melalui berbagai kerangka kerja, salah satunya adalah *Initiative for ASEAN Integration (IAI)* yang bertujuan memperkecil kesenjangan pembangunan. Meski begitu, berbagai kajian menunjukkan bahwa tantangan dalam pelaksanaan kebijakan, keterbatasan kapasitas negara anggota, serta ketidakseimbangan dalam partisipasi ekonomi masih menghambat efektivitas program-program tersebut (Sok, 2019). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analisis yang tidak hanya melihat perbedaan antar negara, tetapi juga memahami bagaimana ketimpangan itu terbentuk dan berkembang secara kolektif dalam konteks kawasan.

Penelitian ini menganalisis masing-masing negara anggota ASEAN secara individual menggunakan pendekatan efek tetap (*fixed effect*). Pendekatan ini dipilih untuk menangkap karakteristik khas dari tiap negara yang bersifat tetap sepanjang waktu, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di setiap negara ASEAN secara spesifik.

Ketimpangan pendapatan di kawasan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan teknologi. Human Development Index mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan berdampak signifikan pada distribusi pendapatan. Kinerja tata kelola pemerintahan memengaruhi arah dan hasil kebijakan ekonomi, yang pada gilirannya berdampak pada ketimpangan (Acemoglu et al., 2014). Sementara itu, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berperan ganda, di satu sisi memperluas akses terhadap informasi dan peluang ekonomi, namun di sisi lain dapat memperlebar kesenjangan digital antarkelompok masyarakat.

Dalam literatur yang ada, terdapat keterbatasan mengenai pengaruh simultan Human Development Index, kinerja tata kelola, serta teknologi informasi dan komunikasi terhadap ketimpangan di ASEAN sebagai satu kawasan. Mayoritas penelitian sebelumnya hanya berfokus pada faktor-faktor tertentu secara terpisah antar negara. Studi ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dengan melakukan analisis komprehensif terhadap ketimpangan pendapatan di negara-negara ASEAN menggunakan pendekatan efek tetap (*fixed effect*), sehingga dapat menangkap pengaruh spesifik dari masing-masing negara secara lebih akurat. (Alvaredo et al., 2018).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh antara Human Development Index, kinerja tata kelola, dan teknologi informasi dan komunikasi terhadap distribusi pendapatan di kawasan ASEAN dalam rentang waktu 2013-2023. Analisis dilakukan menggunakan teknik pengolahan data panel melalui

pendekatan efek tetap (*fixed effect*). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Human Development Index, Kinerja Tata Kelola melalui Indikator Political Stability, dan Teknologi Informasi Komunikasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kawasan ASEAN”

Penelitian ini memberikan kontribusi melalui pendekatan integratif dengan menggabungkan tiga faktor utama dalam satu model analisis ketimpangan untuk kawasan ASEAN. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada satu atau dua variabel secara terpisah atau pada konteks negara tertentu, kajian ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan merata di tingkat kawasan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Human Development Index, kinerja tata kelola melalui indikator political stability dan Teknologi Informasi Komunikasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di kawasan ASEAN?

C. Pembatas Masalah

1. Dari keenam dimensi World Governance Indicators (WGI), penelitian ini hanya menganalisis dimensi political stability. Adapun dimensi voice and accountability, government effectiveness, control of corruption, regulatory

quality dan rule of law tidak diikutsertakan karena terdapat korelasi yang tinggi dan potensi multikolinearitas.

2. Penelitian ini menggunakan periode pengamatan 2013–2023, dengan fokus pada keterkaitan antara Human Development Index, kinerja tata kelola, Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta ketimpangan pendapatan.

D. Tujuan Penelitian

1. Memahami pengaruh Human Development Index, kinerja tata kelola, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap ketimpangan pendapatan di kawasan ASEAN.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah: Memberikan wawasan dan pertimbangan empiris untuk perumusan kebijakan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di kawasan ASEAN melalui penguatan Human Development Index, kinerja tata kelola, serta pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2. Bagi akademisi dan peneliti: Menyediakan referensi dan landasan teoritis bagi penelitian lanjutan tentang faktor-faktor penentu ketimpangan pendapatan dalam tingkat atau kelompok regional, khususnya di Asia Tenggara.
3. Bagi penulis: Memperdalam pemahaman tentang dinamika ketimpangan ekonomi di kawasan ASEAN dan mengembangkan keterampilan dalam analisis data panel serta studi ekonomi regional.

4. Bagi pembaca: Meningkatkan pemahaman tentang peran penting faktor sosial, tata kelola, dan teknologi dalam ketimpangan pendapatan serta pembangunan ekonomi berkelanjutan.

